



**MARITIME DEFENSE POLICY WITHIN THE FRAMEWORK OF
MARITIME DIPLOMACY: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA,
JAPAN, AND AUSTRALIA IN THE INDO-PACIFIC**

**KEBIJAKAN PERTAHANAN LAUT DALAM KERANGKA
DIPLOMASI MARITIM: STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG,
DAN AUSTRALIA DI INDO-PASIFIK**

Destiana Faradiva Eka Putri ¹⁾; Buddy Suseto ²⁾; Lukman Yudho Prakoso ³⁾; Eka Soni Astaryadi ⁴⁾

¹⁾ faradiva.putri@gmail.com, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

²⁾ budiseto@ymail.com, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

³⁾ lukman.prakoso@idu.ac.id, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

⁴⁾ soni.astaryadi@boppj.go.id, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstract

The Indo-Pacific has emerged as a strategic maritime region characterized by increasing geopolitical competition, territorial disputes, and transnational maritime security challenges. These developments require states to strengthen not only their maritime defence capabilities but also their maritime diplomacy to maintain regional stability. This study aims to comparatively analyze maritime defence policies within the framework of maritime diplomacy in Indonesia, Japan, and Australia. A qualitative approach with a comparative case study design was employed. Data were collected through document analysis of official defence policies, national security strategies, and relevant academic literature, and analyzed using qualitative content analysis and cross-case comparison. The findings reveal that the integration of maritime defence policy and maritime diplomacy differs significantly among the three countries due to variations in strategic orientation, threat perception, and geopolitical interests. Indonesia adopts a strategic autonomy model, emphasizing sovereignty protection and multilateral diplomacy through ASEAN-centered mechanisms. Japan implements a rules-based balancing model by integrating the Free and Open Indo-Pacific (FOIP) strategy with maritime security cooperation and defence modernization. Australia applies an alliance-based deterrence model, combining maritime defence with strategic alliances such as AUKUS and broader regional security partnerships. The study argues that strategic orientation is the primary determinant of how states integrate maritime defence and maritime diplomacy. It also proposes a comparative analytical typology that contributes to the growing literature on maritime security and defence diplomacy in the Indo-Pacific.

Keywords: FOIP; Indo-Pacific; Maritime Defence Policy; Maritime Diplomacy; Strategic Autonomy

Abstrak

Kawasan Indo-Pasifik berkembang menjadi ruang strategis yang ditandai oleh meningkatnya rivalitas geopolitik, sengketa maritim, dan ancaman keamanan lintas negara. Kondisi tersebut mendorong negara-negara di kawasan untuk tidak hanya memperkuat kebijakan pertahanan laut, tetapi juga mengintegrasikannya dengan diplomasi maritim guna menjaga stabilitas kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif kebijakan pertahanan laut dalam kerangka diplomasi maritim di Indonesia, Jepang, dan Australia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan resmi, strategi pertahanan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif dan analisis lintas kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim dipengaruhi oleh orientasi strategis, persepsi ancaman, dan kepentingan geopolitik masing-masing negara. Indonesia menerapkan model strategic autonomy yang menitikberatkan pada perlindungan kedaulatan dan diplomasi multilateral. Jepang mengembangkan model rules-based balancing melalui strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang mengintegrasikan modernisasi pertahanan dengan kerja sama keamanan maritim. Sementara itu, Australia menerapkan model alliance-based deterrence melalui penguatan aliansi strategis dan interoperabilitas pertahanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa orientasi strategis merupakan faktor utama yang menentukan tingkat integrasi antara kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim. Selain itu, penelitian ini menawarkan tipologi analitis mengenai pola integrasi kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim sebagai kontribusi terhadap pengembangan kajian keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik.

Kata Kunci: Diplomasi Maritim; Indo-Pasifik; Kebijakan Pertahanan; Keamanan Maritim; Pertahanan Laut



PENDAHULUAN

Kawasan Indo-Pasifik dalam satu dekade terakhir mengalami transformasi menjadi pusat kontestasi geopolitik dan geostrategis dunia. Konsentrasi jalur perdagangan internasional, kepentingan ekonomi global, serta meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadikan kawasan ini sebagai arena persaingan kekuatan yang semakin kompleks. Dinamika tersebut tercermin melalui meningkatnya modernisasi kekuatan laut, sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, pembentukan berbagai kemitraan keamanan seperti Quad dan AUKUS, serta berkembangnya ancaman keamanan maritim non-tradisional, termasuk *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) fishing, perompakan, penyelundupan lintas negara, dan kejahatan maritim lainnya. Kondisi tersebut menempatkan keamanan maritim sebagai salah satu isu strategis yang menentukan stabilitas kawasan Indo-Pasifik (Norlyanti, 2026).

Perubahan lanskap keamanan tersebut mendorong negara-negara Indo-Pasifik untuk memperkuat kebijakan pertahanan laut sebagai instrumen dalam menjaga kedaulatan wilayah, melindungi kepentingan nasional, serta menjamin keamanan jalur komunikasi laut (*Sea Lines of Communication/SLOCs*) (Nurjanah et al., 2026). Namun demikian, peningkatan kapabilitas pertahanan laut tidak selalu menghasilkan stabilitas kawasan. Dalam perspektif hubungan internasional, penguatan kemampuan militer berpotensi memunculkan *security dilemma*, yaitu situasi ketika peningkatan pertahanan suatu negara justru dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain sehingga mendorong perlombaan persenjataan dan meningkatkan risiko konflik (Nurjanah et al., 2025). Oleh karena itu, kebijakan pertahanan laut tidak dapat dipandang semata sebagai instrumen militer, melainkan perlu diintegrasikan dengan diplomasi maritim sebagai mekanisme pembangunan kepercayaan (*confidence-building measures*), pengelolaan konflik, serta penguatan kerja sama regional (Dewita, 2021).

Diplomasi maritim menjadi semakin relevan karena menyediakan ruang bagi negara-negara untuk mengelola kompetisi strategis tanpa harus mengedepankan konfrontasi militer (Prabowo, 2022). Melalui kerja sama pertahanan, latihan militer bersama, patroli terkoordinasi, pertukaran informasi, hingga forum multilateral, diplomasi maritim berfungsi sebagai instrumen yang menjembatani kepentingan keamanan nasional dengan upaya menjaga stabilitas kawasan (Espeña, 2026; Susilowati et al., 2024). Dengan demikian, efektivitas kebijakan pertahanan laut pada era Indo-Pasifik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer yang dimiliki suatu negara, tetapi juga oleh kemampuannya mengombinasikan instrumen pertahanan dengan strategi diplomasi yang adaptif dan kooperatif (Rai, 2022).

Indonesia, Jepang, dan Australia merupakan tiga aktor penting di Indo-Pasifik yang menunjukkan pendekatan berbeda dalam mengintegrasikan pertahanan laut dengan diplomasi maritim (Nugraha & Sudirman, 2016). Indonesia mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif melalui visi Poros Maritim Dunia yang menempatkan laut sebagai ruang pembangunan, konektivitas, sekaligus diplomasi (Hakiem et al., 2025). Jepang mengembangkan strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang berorientasi pada penguatan tatanan maritim berbasis hukum internasional, kebebasan navigasi, dan kerja sama dengan negara-negara mitra (Nadirah & Oracle, 2025). Sementara itu, Australia mengintegrasikan modernisasi kekuatan pertahanannya dengan penguatan aliansi strategis bersama Amerika Serikat, Inggris, ASEAN, dan negara-negara Pasifik guna merespons perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan (Irsadanar, 2023; Khoirunissa & Aryani, 2022). Perbedaan orientasi strategis tersebut menunjukkan bahwa setiap negara mengembangkan kombinasi kebijakan pertahanan dan diplomasi maritim sesuai dengan kepentingan nasional, posisi geopolitik, serta persepsi ancaman yang dihadapinya (Nishino, 2023).

Meskipun kajian mengenai keamanan maritim Indo-Pasifik telah berkembang pesat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada kebijakan pertahanan atau diplomasi maritim



secara terpisah, maupun menganalisis strategi masing-masing negara secara individual. Penelitian mengenai strategi *Free and Open Indo-Pacific* Jepang, Poros Maritim Dunia Indonesia, maupun kebijakan pertahanan Australia umumnya belum mengkaji secara komparatif bagaimana ketiga negara mengintegrasikan kebijakan pertahanan laut dengan diplomasi maritim sebagai respons terhadap dinamika geopolitik kawasan. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai pola konvergensi dan divergensi strategi yang diterapkan oleh negara-negara tersebut dalam membangun keamanan maritim regional.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kebijakan pertahanan laut Indonesia, Jepang, dan Australia dalam kerangka diplomasi maritim di kawasan Indo-Pasifik. Analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik kebijakan masing-masing negara, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan strategisnya, serta mengungkap pola hubungan antara instrumen pertahanan dan diplomasi dalam menghadapi dinamika keamanan maritim kontemporer. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai hubungan antara kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim pada konteks Indo-Pasifik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan masukan bagi perumusan kebijakan keamanan maritim yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada stabilitas kawasan.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Pertahanan Laut

Kebijakan pertahanan laut merupakan seperangkat strategi, doktrin, dan kebijakan yang dirumuskan negara untuk melindungi kedaulatan wilayah, kepentingan nasional, serta menjamin keamanan ruang maritim. Dalam perspektif pertahanan modern, kebijakan pertahanan laut tidak hanya berorientasi pada pembangunan kekuatan angkatan laut (*naval power*), tetapi juga mencakup pengembangan kemampuan pengawasan maritim (*maritime domain awareness*), perlindungan jalur komunikasi laut (*sea lines of communication*), penegakan hukum di laut, serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman militer maupun non-militer (Nurjanah et al., 2025).

Menurut Geoffrey Till, kekuatan laut (*sea power*) pada era kontemporer tidak lagi semata-mata diukur melalui superioritas militer, tetapi juga melalui kemampuan negara memanfaatkan laut sebagai instrumen keamanan, ekonomi, dan diplomasi (Nurjanah et al., 2026). Oleh karena itu, kebijakan pertahanan laut berkembang dari pendekatan tradisional yang berorientasi pada peperangan menuju pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan unsur pertahanan, keamanan, dan kerja sama internasional.

Dalam konteks Indo-Pasifik, perubahan lingkungan strategis akibat meningkatnya rivalitas kekuatan besar mendorong negara-negara untuk melakukan modernisasi armada laut, meningkatkan interoperabilitas antarmiliter, serta memperkuat kapasitas pertahanan maritim. Namun demikian, peningkatan kapabilitas militer tanpa mekanisme pembangunan kepercayaan berpotensi memperbesar *security dilemma* sehingga diperlukan instrumen non-militer yang mampu menjaga stabilitas Kawasan (Khoirunissa & Aryani, 2022).

Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim merupakan penggunaan instrumen maritim sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik luar negeri dan kepentingan strategis suatu negara melalui pendekatan damai, kerja sama, dan pembangunan kepercayaan (Suherry et al., 2025). Le Mière menjelaskan bahwa diplomasi maritim memanfaatkan kapal perang, penjaga pantai, maupun institusi maritim lainnya sebagai instrumen politik tanpa harus menggunakan kekuatan bersenjata secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan negara menunjukkan kehadiran strategis (*strategic presence*), memperkuat hubungan bilateral maupun multilateral, sekaligus memberikan efek pencegahan (*deterrence*) tanpa memicu eskalasi konflik (Wirawan, 2023).



Pada perkembangan selanjutnya, diplomasi maritim tidak hanya diwujudkan melalui *naval diplomacy*, tetapi juga mencakup patroli bersama, latihan militer gabungan, bantuan kemanusiaan (*Humanitarian Assistance and Disaster Relief*), pertukaran informasi intelijen maritim, pengembangan kapasitas (*capacity building*), serta kerja sama keamanan laut dalam berbagai forum regional (Prabowo, 2022). Dengan demikian, diplomasi maritim menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun stabilitas kawasan, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kompetisi geopolitik tinggi seperti Indo-Pasifik.

Integrasi Kebijakan Pertahanan Laut dan Diplomasi Maritim

Literatur keamanan maritim kontemporer menunjukkan bahwa pertahanan laut dan diplomasi maritim merupakan dua instrumen yang saling melengkapi. Pertahanan laut menyediakan kapasitas militer untuk menjaga kedaulatan dan memberikan efek tangkal (*deterrence*), sedangkan diplomasi maritim berfungsi membangun kepercayaan, mengurangi potensi konflik, serta memperkuat kerja sama keamanan regional (A. E. Pangemanan & Perwita, 2022).

Dalam perspektif *smart power*, negara tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan militer (*hard power*), tetapi juga mengombinasikannya dengan instrumen diplomatik agar tujuan strategis dapat dicapai secara lebih efektif (Espeña, 2026). Sinergi tersebut semakin penting di kawasan Indo-Pasifik yang ditandai oleh meningkatnya kompetisi geopolitik, namun tetap memiliki tingkat interdependensi ekonomi yang tinggi. Oleh sebab itu, efektivitas kebijakan pertahanan laut tidak hanya ditentukan oleh besarnya kemampuan militer, melainkan juga oleh kemampuan negara mengelola hubungan diplomatik dengan aktor-aktor regional maupun global (Rahmadhani et al., 2025).

Bagi negara-negara *middle powers* seperti Indonesia, Jepang, dan Australia, integrasi pertahanan laut dengan diplomasi maritim menjadi strategi untuk menjaga kepentingan nasional tanpa harus terjebak dalam konfrontasi terbuka antarkekuatan besar. Strategi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kerja sama pertahanan, latihan militer bersama, bantuan keamanan maritim, serta penguatan institusi regional yang mendukung tatanan maritim berbasis hukum internasional (Hanggarini & Perwita, 2024).

Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai pertahanan laut dan diplomasi maritim di kawasan Indo-Pasifik telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian penelitian berfokus pada strategi maritim Indonesia melalui konsep Poros Maritim Dunia dan perannya sebagai *middle power* dalam menjaga stabilitas kawasan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa diplomasi maritim Indonesia diarahkan untuk memperkuat kepemimpinan regional melalui pendekatan kooperatif serta penguatan kerja sama keamanan maritim (Nurjanah et al., 2025; Suherry et al., 2025).

Sementara itu, penelitian mengenai Jepang umumnya menitikberatkan pada implementasi strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP), khususnya dalam meningkatkan kerja sama keamanan maritim, bantuan kapasitas pertahanan, serta penguatan tatanan maritim berbasis aturan (*rules-based maritime order*) (Irsadanar, 2023; Ivanka, 2023; Nadirah & Oracle, 2025). Kajian tersebut memperlihatkan bahwa Jepang semakin mengombinasikan instrumen diplomasi dengan penguatan kapabilitas pertahanan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis di Indo-Pasifik.

Di sisi lain, penelitian mengenai Australia lebih banyak mengulas diplomasi pertahanan (*defence diplomacy*), modernisasi kekuatan laut, serta penguatan aliansi strategis dengan Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara (Po, 2023; Zulkifli et al., 2023). Diplomasi pertahanan dipandang sebagai instrumen penting dalam membangun hubungan yang stabil, meningkatkan interoperabilitas militer, dan memperkuat kepercayaan antarnegara.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menganalisis Indonesia, Jepang, dan Australia secara terpisah atau hanya berfokus pada salah satu aspek, yaitu



pertahanan laut ataupun diplomasi maritim. Penelitian yang membandingkan bagaimana ketiga negara mengintegrasikan kebijakan pertahanan laut dengan diplomasi maritim sebagai respons terhadap dinamika geopolitik Indo-Pasifik masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis komparatif yang menekankan hubungan antara orientasi kebijakan pertahanan laut dan strategi diplomasi maritim pada tiga negara dengan karakteristik geopolitik yang berbeda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif (*comparative case study*) untuk menganalisis kebijakan pertahanan laut dalam kerangka diplomasi maritim pada tiga negara, yaitu Indonesia, Jepang, dan Australia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami orientasi kebijakan, konteks strategis, serta dinamika hubungan antara instrumen pertahanan dan diplomasi yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif (Creswell, 2014). Sementara itu, desain studi kasus komparatif memungkinkan peneliti mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pilihan kebijakan masing-masing negara dalam menghadapi dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik (Ivanka, 2023; Rachmawati, 2017).

Pemilihan Indonesia, Jepang, dan Australia didasarkan pada pertimbangan teoritis dan empiris. Ketiga negara merupakan aktor strategis di kawasan Indo-Pasifik yang memiliki kepentingan maritim yang kuat, tetapi mengembangkan orientasi kebijakan yang berbeda. Indonesia menerapkan pendekatan *strategic autonomy* melalui politik luar negeri bebas aktif dan visi Poros Maritim Dunia. Jepang mengembangkan strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang menitikberatkan pada penguatan tatanan maritim berbasis aturan (*rules-based maritime order*) (Nadirah & Oracle, 2025), sedangkan Australia mengombinasikan modernisasi pertahanan dengan penguatan aliansi strategis bersama mitra regional maupun global (Scott, 2019). Variasi karakteristik tersebut menjadikan ketiga negara relevan untuk dianalisis secara komparatif dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan pertahanan laut masing-masing negara, sedangkan objek analisis mencakup orientasi strategis, doktrin pertahanan, bentuk diplomasi maritim, kerja sama keamanan, serta respons terhadap dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Analisis dilakukan pada tingkat kebijakan negara (*state-level analysis*) dengan menempatkan setiap negara sebagai satu kasus yang kemudian dibandingkan menggunakan kerangka analisis yang sama.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Sumber data meliputi dokumen kebijakan resmi, seperti Buku Putih Pertahanan Indonesia, Indonesia Maritime Doctrine, Free and Open Indo-Pacific Strategy Jepang, National Security Strategy of Japan, Defence Strategic Review Australia, National Defence Strategy, serta berbagai dokumen ASEAN, laporan organisasi internasional, publikasi lembaga penelitian, dan artikel ilmiah bereputasi yang membahas keamanan maritim serta diplomasi pertahanan di kawasan Indo-Pasifik. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kebijakan dan implementasinya.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*qualitative content analysis*) yang dipadukan dengan analisis tematik (*thematic analysis*) (Rahmadhani et al., 2023). Tahap pertama dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan pengkodean informasi yang berkaitan dengan dimensi kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim dari setiap dokumen yang dianalisis. Tahap kedua adalah pengelompokan data ke dalam tema-tema utama, yaitu orientasi strategis, persepsi ancaman, pengembangan kapabilitas pertahanan laut, kerja sama keamanan



maritim, dan praktik diplomasi maritim. Selanjutnya dilakukan analisis lintas kasus (cross-case analysis) untuk mengidentifikasi pola konvergensi maupun divergensi kebijakan Indonesia, Jepang, dan Australia serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan strategi ketiga negara.

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen pemerintah, publikasi akademik, laporan lembaga internasional, dan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, interpretasi data dilakukan secara sistematis dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka konseptual mengenai kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim sehingga menghasilkan analisis yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Keamanan Maritim sebagai Pendorong Transformasi Kebijakan Pertahanan Laut

Hasil analisis dokumen primer menunjukkan bahwa perubahan lingkungan strategis Indo-Pasifik menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim. Ketiga negara menghadapi lingkungan keamanan yang ditandai oleh meningkatnya kompetisi kekuatan besar, perubahan keseimbangan kekuatan, sengketa dan ketegangan di ruang maritim, serta munculnya ancaman keamanan yang bersifat lintas batas (Ivanka, 2023; A. Pangemanan et al., 2021). Namun demikian, respons yang dikembangkan oleh masing-masing negara tidak menunjukkan pola yang seragam. Perbedaan tersebut terlihat dari bagaimana masing-masing negara mendefinisikan kepentingan nasional, memandang ancaman, membangun kapabilitas pertahanan, serta menggunakan kerja sama dan diplomasi sebagai instrumen untuk mengelola lingkungan strategis.

Dalam *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, lingkungan strategis Indonesia dipahami dalam kaitannya dengan posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut luas dan berada pada jalur perdagangan internasional. Dokumen tersebut menempatkan pertahanan negara dalam kerangka perlindungan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai bentuk ancaman. Dengan demikian, dimensi maritim menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pertahanan karena karakter geografis Indonesia sekaligus menciptakan kepentingan dan kerentanan strategis yang harus dikelola oleh negara (Naturrohman, 2026).

Jepang menghadapi lingkungan strategis yang berbeda. *National Security Strategy of Japan 2022* menggambarkan lingkungan internasional sebagai semakin kompleks akibat perubahan keseimbangan kekuatan dan intensifikasi kompetisi geopolitik. Dokumen tersebut juga menyoroti tantangan terhadap tatanan internasional yang bebas, terbuka, dan stabil serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai universal dan rule of law. Sementara itu, Australia dalam *Defence Strategic Review 2023* dan *National Defence Strategy 2024* memandang lingkungan strategisnya sebagai semakin kompleks dan menuntut perubahan mendasar terhadap postur pertahanan. Strategi pertahanan Australia kemudian diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk menghadapi risiko strategis dengan mengintegrasikan kekuatan nasional, memperkuat kemampuan militer, serta meningkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat dan mitra strategis lainnya.

Dengan demikian, analisis dokumen primer memperlihatkan bahwa ketiga negara menghadapi perubahan lingkungan keamanan yang sama-sama kompleks, tetapi menerjemahkannya ke dalam pilihan strategis yang berbeda. Perbedaan tersebut kemudian menjadi dasar munculnya tiga pola integrasi kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim,



yaitu *strategic autonomy* pada Indonesia, *rules-based balancing* pada Jepang, dan *alliance-based deterrence* pada Australia.

Indonesia: *Strategic Autonomy* dan Penguatan Pertahanan Maritim

Analisis terhadap *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015* menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan Indonesia menempatkan perlindungan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa sebagai tujuan utama pertahanan negara. Dokumen tersebut menegaskan bahwa pertahanan negara diarahkan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman. Orientasi tersebut memperlihatkan bahwa pertahanan Indonesia pada dasarnya berangkat dari kebutuhan untuk melindungi kepentingan nasional dan wilayah negara, termasuk ruang maritim yang memiliki posisi strategis bagi Indonesia (Setiawan, 2025).

Buku Putih Pertahanan Indonesia juga memperlihatkan karakter kebijakan pertahanan yang tidak diarahkan pada ekspansi wilayah atau penggunaan kekuatan secara ofensif. Pembangunan kemampuan pertahanan ditempatkan sebagai instrumen untuk memastikan negara memiliki kapasitas dalam menghadapi berbagai ancaman sekaligus mendukung pelaksanaan politik luar negeri (Irsadanar, 2023). Dengan demikian, pembangunan kekuatan militer tidak berdiri sendiri, tetapi berjalan bersama penggunaan diplomasi dan kerja sama dengan negara lain. Dokumen tersebut menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagai salah satu landasan dalam penyelenggaraan pertahanan sehingga Indonesia memiliki ruang untuk membangun kerja sama tanpa harus terikat pada suatu blok kekuatan tertentu (Hakiem et al., 2025; Nugraha & Sudirman, 2016).

Dalam konteks maritim, orientasi tersebut menghasilkan pola hubungan antara pertahanan dan diplomasi yang menekankan perlindungan kepentingan nasional sekaligus pemeliharaan fleksibilitas strategis (Hanggarini & Perwita, 2024). Kapabilitas pertahanan laut berfungsi menjaga kedaulatan dan kepentingan Indonesia di ruang maritim, sedangkan diplomasi digunakan untuk membangun kerja sama, mengelola potensi konflik, serta menciptakan lingkungan kawasan yang stabil. Pola tersebut sejalan dengan posisi Indonesia yang secara geografis berada di antara dua samudra dan memiliki kepentingan langsung terhadap keamanan jalur perdagangan, wilayah perbatasan, dan stabilitas kawasan.

Berdasarkan temuan tersebut, Indonesia dapat dikategorikan sebagai model *strategic autonomy*. Otonomi strategis dalam konteks penelitian ini tidak berarti Indonesia menolak kerja sama pertahanan, tetapi menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan kemampuan menentukan pilihan strategis berdasarkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, kerja sama multilateral dan mekanisme regional seperti ASEAN menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus menghindari ketergantungan terhadap satu kekuatan besar (Khoirunissa & Aryani, 2022).

Temuan ini memperlihatkan bahwa integrasi pertahanan laut dan diplomasi maritim Indonesia bersifat relatif moderat. Pertahanan tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga kedaulatan dan wilayah nasional, tetapi diplomasi digunakan untuk mencegah agar peningkatan kemampuan pertahanan tidak berkembang menjadi eskalasi kompetisi kawasan. Dengan demikian, karakter *strategic autonomy* Indonesia terletak pada upaya mempertahankan keseimbangan antara penguatan kemampuan pertahanan dan fleksibilitas diplomatik.

Jepang: *Rules-Based Balancing* melalui *Free and Open Indo-Pacific*

Berbeda dengan Indonesia, analisis dokumen primer Jepang menunjukkan bahwa kebijakan keamanan Jepang memiliki orientasi yang lebih eksplisit terhadap pembentukan dan pemeliharaan tatanan internasional berbasis aturan. *National Security Strategy of Japan* yang ditetapkan pada 16 Desember 2022 menggambarkan lingkungan internasional sebagai semakin kompleks akibat perubahan keseimbangan kekuatan dan meningkatnya kompetisi geopolitik.



Dokumen tersebut menekankan pentingnya mempertahankan tatanan internasional yang bebas, terbuka, dan stabil serta nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan rule of law (Wirawan, 2023).

Orientasi tersebut tidak hanya diterjemahkan melalui pembangunan kemampuan pertahanan, tetapi juga melalui strategi diplomatik yang lebih luas. Pemerintah Jepang menetapkan *National Security Strategy*, *National Defense Strategy*, dan *Defense Buildup Program* sebagai tiga dokumen strategis yang menjadi dasar baru kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang. Ketiganya menunjukkan adanya hubungan yang semakin erat antara penilaian ancaman, pembangunan kemampuan pertahanan, dan penguatan kerja sama dengan negara-negara mitra.

Integrasi antara pertahanan dan diplomasi semakin terlihat melalui kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP). Dalam *New Plan for a Free and Open Indo-Pacific* yang diumumkan pada 2023, Jepang mengembangkan empat pilar kerja sama, yaitu prinsip perdamaian dan aturan untuk kemakmuran, penyelesaian berbagai tantangan melalui pendekatan Indo-Pacific, konektivitas berlapis, serta perluasan upaya keamanan dan penggunaan ruang laut hingga udara.

Dimensi maritim menjadi salah satu bagian penting dari FOIP. Penekanan terhadap rule of law, keamanan dan keselamatan penggunaan laut, konektivitas, serta pembangunan kapasitas menunjukkan bahwa Jepang menggunakan diplomasi maritim untuk membentuk lingkungan strategis yang mendukung kepentingan nasionalnya. Dengan kata lain, diplomasi maritim Jepang tidak hanya ditujukan untuk membangun hubungan bilateral atau multilateral, tetapi juga digunakan untuk memperkuat tatanan kawasan yang dianggap mampu menjamin keterbukaan, stabilitas, dan kebebasan navigasi.

Berdasarkan analisis tersebut, Jepang dapat dikategorikan sebagai model rules-based balancing. Model ini menunjukkan kombinasi antara peningkatan kemampuan pertahanan dengan pembangunan jaringan kemitraan dan penguatan tatanan internasional berbasis aturan. Jepang tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanannya sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis, tetapi juga berupaya membangun lingkungan eksternal yang mendukung kepentingan keamanannya melalui FOIP dan berbagai bentuk kerja sama dengan negara-negara mitra.

Pola tersebut menunjukkan tingkat integrasi pertahanan laut dan diplomasi maritim yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Jika Indonesia lebih menekankan fleksibilitas strategis melalui pendekatan bebas aktif, Jepang secara lebih eksplisit menghubungkan kebijakan pertahanan dengan agenda pembentukan tatanan regional berbasis aturan. Dengan demikian, diplomasi maritim Jepang berfungsi sebagai instrumen pendukung pertahanan sekaligus instrumen untuk membentuk lingkungan strategis yang menguntungkan kepentingan keamanan nasional.

Australia: Alliance-Based Deterrence

Australia menunjukkan orientasi yang berbeda dari Indonesia dan Jepang. *Defence Strategic Review 2023* menjadi dasar penting bagi perubahan arah kebijakan pertahanan Australia dalam merespons lingkungan strategis yang semakin kompleks. Review tersebut digunakan pemerintah Australia untuk mengevaluasi postur, struktur kekuatan, dan kapabilitas pertahanan serta menentukan prioritas pembangunan kemampuan pertahanan dalam menghadapi risiko strategis yang berkembang.

Arah kebijakan tersebut kemudian diperjelas dalam *2024 National Defence Strategy*. Dokumen tersebut menempatkan *National Defence* sebagai pendekatan yang mengintegrasikan seluruh instrumen kekuatan nasional untuk melindungi Australia dan memajukan kepentingannya. Strategi tersebut juga menempatkan *Strategy of Denial* sebagai landasan utama perencanaan pertahanan Australia. Strategi ini bertujuan mengubah perhitungan pihak



yang berpotensi menjadi lawan agar penggunaan kekuatan militer terhadap Australia atau kepentingannya dipandang tidak dapat mencapai tujuan dengan biaya yang dapat diterima.

National Defence Strategy 2024 juga secara eksplisit menempatkan kerja sama dengan Amerika Serikat dan mitra utama sebagai bagian dari *Strategy of Denial*. Selain itu, Australia memberikan perhatian terhadap penguatan hubungan pertahanan dengan negara-negara Asia Tenggara, Pasifik, kawasan Samudra Hindia, dan Asia Utara. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pertahanan Australia tidak dirancang secara terisolasi, tetapi dibangun dalam jaringan hubungan pertahanan dan keamanan dengan negara-negara mitra.

Dimensi maritim memperoleh posisi penting dalam transformasi tersebut. *National Defence Strategy 2024* menyebut pembangunan kemampuan Angkatan Laut yang lebih besar dan lebih lethal sebagai bagian dari pembentukan *integrated, focused force*. Pada saat yang sama, strategi tersebut mengarahkan kemampuan pertahanan untuk melindungi Australia dan wilayah sekitarnya, melakukan deterrence melalui denial terhadap proyeksi kekuatan pihak yang berpotensi menjadi lawan, serta melindungi hubungan ekonomi Australia dengan kawasan dan dunia.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan dan diplomasi maritim Australia tidak dapat dipisahkan dari strategi deterrence. Kerja sama pertahanan, interoperabilitas, latihan bersama, serta hubungan strategis dengan mitra berfungsi memperbesar kredibilitas kemampuan Australia dalam melakukan deterrence. Dengan demikian, diplomasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk membangun hubungan politik, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan kemampuan pertahanan kolektif.

Berdasarkan analisis tersebut, Australia dapat dikategorikan sebagai model alliance-based deterrence. Model ini ditandai oleh integrasi yang kuat antara pembangunan kapabilitas pertahanan, strategi deterrence, dan jaringan aliansi atau kemitraan strategis. Berbeda dengan Indonesia yang mempertahankan otonomi strategis dan Jepang yang menekankan tatanan berbasis aturan melalui FOIP, Australia secara lebih langsung menghubungkan kemampuan pertahanan dengan kemampuan bekerja bersama Amerika Serikat dan mitra strategis lainnya.

Dengan demikian, integrasi pertahanan laut dan diplomasi maritim Australia dapat dikategorikan sebagai yang paling kuat di antara ketiga negara dalam kerangka penelitian ini. Namun, tingkat integrasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pilihan strategis Australia sangat berkaitan dengan struktur hubungan pertahanan dan keamanan yang telah dibangun bersama Amerika Serikat dan mitra lainnya.

Integrasi Pertahanan Laut dan Diplomasi Maritim

Analisis komparatif menunjukkan bahwa ketiga negara sama-sama mengintegrasikan pertahanan laut dengan diplomasi maritim, namun tingkat integrasinya berbeda.

Tabel 1. Analisis Komparatif

Dimensi	Indonesia	Jepang	Australia
Orientasi Strategis	Strategic autonomy	Rules-based balancing	Alliance-based deterrence
Fokus Pertahanan	Perlindungan kedaulatan	Keamanan jalur pelayaran	Daya tangkal kolektif
Instrumen Diplomasi	ASEAN, IORA, ADMM-Plus	FOIP, Quad, Capacity Building	AUKUS, Five Eyes, Pacific Maritime Security Program
Tingkat Integrasi	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi

Sumber: data diproses, 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perbedaan utama ketiga negara bukan terletak pada ada atau tidaknya integrasi antara pertahanan dan diplomasi, tetapi pada mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis. Indonesia mengandalkan fleksibilitas strategis dan



mekanisme multilateral; Jepang menggunakan jaringan kemitraan dan tatanan berbasis aturan; sedangkan Australia mengandalkan deterrence yang diperkuat melalui aliansi dan interoperabilitas (Nadirah & Oracle, 2025).

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa istilah *strategic autonomy*, *rules-based balancing*, dan *alliance-based deterrence* dapat digunakan sebagai tipologi untuk menjelaskan variasi integrasi kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim. Ketiganya bukan sekadar kategori yang diturunkan dari penelitian terdahulu, tetapi merupakan hasil sintesis terhadap orientasi yang ditemukan dalam dokumen kebijakan primer masing-masing negara. Buku Putih Pertahanan Indonesia menunjukkan penekanan pada perlindungan kedaulatan dan fleksibilitas strategis; dokumen keamanan Jepang menunjukkan penekanan pada tatanan internasional berbasis aturan dan FOIP; sedangkan dokumen pertahanan Australia menunjukkan penekanan pada *Strategy of Denial*, penguatan kemampuan militer, dan kerja sama dengan Amerika Serikat serta mitra utama (Hanggarini & Perwita, 2024).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim tidak bersifat universal, tetapi dibentuk oleh orientasi strategis yang berkembang dari lingkungan keamanan masing-masing negara. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapabilitas pertahanan laut tidak secara otomatis menghasilkan pola diplomasi maritim yang sama. Sebaliknya, negara mengadaptasi kombinasi instrumen pertahanan dan diplomasi sesuai dengan persepsi ancaman, identitas strategis, dan posisi geopolitiknya.

Dalam kasus Indonesia, orientasi *strategic autonomy* menyebabkan kebijakan pertahanan laut lebih diarahkan pada perlindungan kedaulatan dibandingkan pembentukan aliansi keamanan. Pilihan tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menghindari keberpihakan terhadap blok kekuatan tertentu (Naturrohman, 2026). Akibatnya, diplomasi maritim Indonesia lebih banyak diwujudkan melalui penguatan mekanisme multilateral seperti ASEAN, ADMM-Plus, dan IORA daripada melalui kerja sama pertahanan yang bersifat mengikat. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas diplomatik, tetapi pada saat yang sama membatasi kemampuan Indonesia dalam membangun mekanisme *collective deterrence* terhadap meningkatnya kompetisi geopolitik di Indo-Pacific (ASEAN Secretariat, 2022; Mamentu et al., 2024; Po, 2023). Dengan kata lain, otonomi strategis memberikan ruang manuver politik yang luas, namun menghasilkan integrasi pertahanan diplomasi yang relatif moderat.

Sebaliknya, Jepang menunjukkan pola yang berbeda. Strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) tidak hanya berfungsi sebagai dokumen kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai kerangka yang menyatukan kebijakan pertahanan, diplomasi, dan kerja sama pembangunan (Ivanka, 2023; Nadirah & Oracle, 2025). Dalam konteks ini, modernisasi *Japan Maritime Self-Defense Force* tidak dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kemampuan militer, melainkan juga untuk memperkuat kredibilitas Jepang sebagai penyedia keamanan kawasan (*security provider*) (Lum et al., 2011; Nishino, 2023). Latihan bersama, bantuan peningkatan kapasitas maritim, dan kerja sama teknologi pertahanan menjadi instrumen diplomasi yang memperluas pengaruh Jepang tanpa harus meninggalkan karakter defensif yang dibatasi oleh konstitusinya (Iida, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa diplomasi maritim Jepang berfungsi sebagai mekanisme *strategic balancing*, yaitu mempertahankan keseimbangan kekuatan melalui penguatan jaringan kemitraan, bukan melalui konfrontasi langsung.

Australia memperlihatkan pola integrasi yang lebih tinggi dibandingkan kedua negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh karakter kebijakan pertahanannya yang sejak awal dibangun dalam kerangka aliansi strategis (Dachi et al., 2023; Sari, 2023). Berbeda dengan Indonesia



yang mengutamakan otonomi atau Jepang yang menitikberatkan tatanan berbasis aturan, Australia memandang keamanan nasionalnya sebagai bagian dari keamanan kolektif kawasan. Oleh karena itu, diplomasi maritim tidak berdiri sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang terpisah, tetapi menjadi bagian dari strategi pertahanan nasional melalui AUKUS, ANZUS, Five Eyes, dan berbagai latihan militer gabungan (Darmawan et al., 2025; Hanggarini & Perwita, 2024). Integrasi tersebut meningkatkan interoperabilitas sekaligus memperkuat efek tangkal terhadap perubahan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap aliansi juga menimbulkan konsekuensi berupa berkurangnya fleksibilitas diplomatik dalam merespons dinamika hubungan dengan Tiongkok maupun negara-negara Asia Tenggara (Nach & Ncwadi, 2024).

Jika dibandingkan secara keseluruhan, penelitian ini menemukan adanya tiga model integrasi pertahanan laut dan diplomasi maritim. Model pertama adalah *strategic autonomy*, yang dicirikan oleh dominasi diplomasi multilateral dengan integrasi pertahanan yang masih terbatas sebagaimana terlihat pada Indonesia (Irsadanar, 2023). Model kedua adalah *rules-based balancing*, yaitu integrasi pertahanan dan diplomasi melalui penguatan tatanan internasional berbasis aturan yang diterapkan Jepang (Hanggarini & Perwita, 2024). Model ketiga adalah *alliance-based deterrence*, yaitu integrasi penuh antara pertahanan laut dan diplomasi keamanan melalui jaringan aliansi sebagaimana diterapkan Australia (Hanggarini & Perwita, 2024). Ketiga model tersebut menunjukkan bahwa orientasi strategis negara menjadi variabel yang menjelaskan variasi hubungan antara kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim.

Temuan tersebut memperluas literatur mengenai diplomasi maritim yang selama ini lebih banyak menempatkannya sebagai instrumen komunikasi politik atau naval diplomacy. Dalam konteks Indo-Pasifik, diplomasi maritim berkembang menjadi bagian dari grand strategy yang mengintegrasikan instrumen militer, diplomasi, dan kerja sama keamanan untuk mencapai tujuan geopolitik negara. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pertahanan laut tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapabilitas angkatan laut, tetapi juga oleh kemampuan negara menghubungkan kekuatan tersebut dengan strategi diplomasi yang mampu membangun legitimasi, memperluas kemitraan, dan mengelola kompetisi strategis secara berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim merupakan dua instrumen strategis yang saling melengkapi dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa Indonesia, Jepang, dan Australia mengembangkan model integrasi yang berbeda sesuai dengan orientasi strategis, persepsi ancaman, serta kepentingan geopolitik masing-masing negara.

Indonesia menerapkan pendekatan *strategic autonomy* yang menempatkan diplomasi multilateral sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas kawasan, sementara kebijakan pertahanan laut berfokus pada perlindungan kedaulatan dan keamanan wilayah maritim. Jepang mengembangkan model *rules-based balancing* melalui strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP), yang mengintegrasikan modernisasi kekuatan maritim dengan diplomasi keamanan berbasis hukum internasional dan penguatan kerja sama regional. Adapun Australia menerapkan model *alliance-based deterrence*, yaitu integrasi antara pertahanan laut dan diplomasi maritim melalui penguatan aliansi strategis, interoperabilitas militer, serta peningkatan efek tangkal terhadap perubahan lingkungan keamanan Indo-Pasifik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat integrasi antara kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim dipengaruhi oleh orientasi strategis negara. Semakin tinggi persepsi ancaman terhadap lingkungan keamanan regional, semakin kuat kecenderungan



suatu negara untuk mengintegrasikan instrumen pertahanan dengan diplomasi maritim dalam satu kerangka strategi nasional. Dengan demikian, efektivitas kebijakan keamanan maritim tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas pertahanan, tetapi juga oleh kemampuan negara mengombinasikan kekuatan militer dengan diplomasi sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan, memperkuat kemitraan, dan menjaga stabilitas kawasan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai diplomasi maritim dengan menunjukkan bahwa dalam konteks Indo-Pasifik, diplomasi maritim tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen hubungan luar negeri, tetapi telah berkembang menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional. Penelitian ini juga menawarkan tipologi integrasi kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim yang terdiri atas Strategic Autonomy, Rules-Based Balancing, dan Alliance-Based Deterrence, yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian mengenai kebijakan maritim negara-negara Indo-Pasifik lainnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Dari sisi kebijakan, Indonesia perlu memperkuat integrasi antara kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim melalui peningkatan koordinasi antarlembaga maritim, penguatan *maritime domain awareness*, modernisasi kapabilitas pertahanan laut, serta optimalisasi peran diplomasi pertahanan dalam forum regional seperti ASEAN, ADMM-Plus, dan IORA. Penguatan sinergi tersebut penting agar kebijakan maritim Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga meningkatkan posisi strategis Indonesia dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik.

Dari sisi pengembangan teori, penelitian ini menunjukkan perlunya perluasan konsep diplomasi maritim yang tidak hanya dipahami sebagai aktivitas diplomasi angkatan laut (*naval diplomacy*), tetapi juga sebagai bagian dari *grand strategy* yang mengintegrasikan instrumen pertahanan, diplomasi, dan kerja sama keamanan regional. Pengembangan konseptual tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menjelaskan dinamika keamanan maritim di kawasan yang ditandai oleh meningkatnya kompetisi geopolitik.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan studi dengan melibatkan negara-negara Indo-Pasifik lainnya, seperti India, Korea Selatan, Singapura, atau Amerika Serikat, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi strategi pertahanan laut dan diplomasi maritim. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan *comparative historical analysis*, *process tracing*, atau metode campuran (*mixed methods*) untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat integrasi antara kebijakan pertahanan laut dan diplomasi maritim secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat. (2022). ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. ASEAN. <https://asean.org>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Dachi, E. T., Yurianto, M., & Purwanto, P. (2023). The Indo-Pacific Context: Maritime Security Challenges And Diplomacy Of Asean Countries. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6), 1872–1881. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.509>
- Darmawan, W., Sumadinata, R. W. S., Akim, & Darmawan, W. B. (2025). Political dynamics of Indonesia-Australia defence cooperation: Navigating geopolitical challenges in the Indo-Pacific. *Research Journal in Advanced Humanities*, 6(3), 1–40. <https://doi.org/10.58256/m019k676>
- Dewita, J. S. (2021). Indonesia Participation in Defense Diplomacy in Indo-Pacific. *UPH*



- Journal of International Relations*, 13(25), 35–51.
<https://doi.org/10.19166/verity.v13i25.4467>
- Espeña, J. B. B. (2026). Naval Diplomacy and Strategic Signaling in a Multiplex Rules-Based Order: Australia, Japan, and India's Engagements With the Philippines. *Asian Politics & Policy*, 18(1), e70056. <https://doi.org/10.1111/aspp.70056>
- Hakim, F. N., Mayasari, M., & Abidin, Z. (2025). Indonesia's Global Maritime Fulcrum Vision and Regional Security in Indo-Pacific. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 5(1), 50–64. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v5i1.4309>
- Hanggarini, P., & Perwita, A. A. B. (2024). Changes and Implications of Australia's Foreign and Defense Policy. *Journal of Indo-Pacific Affairs*, 7(6), 117–126. <https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/>
- Iida, K. (2024). The Political Economy of Supply Chain Transformation in Asia: From "China Plus One" to De-Sinicization. *Asia Policy*, 19(3), 71–90. <https://doi.org/10.1353/asp.2024.a934566>
- Irsadanar, R. J. P. (2023). Japan and Indonesia as Middle Powers in Indo-Pacific: Towards AOIP – FOIP Synergy. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(2), 1–17. <https://doi.org/10.70836/jh.v8i2.12>
- Ivanka, D. V. (2023). Analisis Kebijakan "Free and Open Indo-Pacific" Jepang: sebagai Jawaban atas Ketidakpastian di Kawasan Indo-Pasifik. (March).
- Khoirunissa, L., & Aryani, M. I. (2022). Diplomasi Maritim Indonesia dalam Perumusan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 3(2), 44–70. <https://doi.org/10.25077/fetrian.3.2.44-70.2021>
- Lum, T., Dolven, B., Manyin, M. E., Martin, M. F., & Vaughn, B. (2011). United States Relations With The Association Of Southeast Asian Nations (Asean). *Current Politics and Economics of South, Southeastern, and Central Asia*, 20(2), 247.
- Mamentu, M., Rares, J. J., & Lond, V. Y. (2024). Indonesian Foreign Policy in Encouraging the Acceleration of Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2776. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2776>
- Nach, M., & Ncwadi, R. (2024). BRICS economic integration: Prospects and challenges. *South African Journal of International Affairs*, 31(2), 151–166. <https://doi.org/10.1080/10220461.2024.2380676>
- Nadirah, N., & Oracle, Y. N. (2025). Kebijakan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) Jepang: Implikasinya Terhadap Keamanan Maritim Indonesia. (*Mjir*) *Moestopo Journal International Relations*, 5(1), 15–25. <https://doi.org/10.32509/mjir.v5i1.5534>
- Naturrohman, A. (2026). Eksplorasi Seismik Migas sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Diplomasi Ekonomi di Wilayah Natuna. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 10(1), 60–73. <https://doi.org/10.32487/jshp.v10i1.2824>
- Nishino, J. (2023). Japan's New Plan for a "Free and Open Indo-Pacific" and Its Challenges. *Asia Policy*, 18(3), 17–25. <https://www.jstor.org/stable/27254665>
- Norlyanti, N. (2026). Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia: Implementasi White Hull Diplomacy Dalam Mengelola Grey Zone Di Laut Natuna Utara. *Indonesian Maritime Journal*, 13(3), 11. <https://doi.org/10.52307/jmi.v9i2.199>
- Nugraha, M. H. R., & Sudirman, A. (2016). Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 175–182. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11059>
- Nurjanah, I., Perwita, A. A. B., & Hendarwoto, Y. (2025). Safeguarding Maritime Critical Infrastructure: Indonesia's Defense Diplomacy in the Indo-Pacific Security Architecture under the Joko Widodo Administration (2014-2024). *Asian Journal of Science*,



- Technology, Engineering, and Art, 3(5), 1746–1768. <https://doi.org/10.58578/AJSTE.A.v3i5.7607>
- Nurjanah, I., Timur, F. G. C., & Inkiwang, F. W. (2026). Japan's Defense Strategy Transformation in the Indo-Pacific: Relevance, Oppotunities, and Challanges for Indonesia's Defense Diplomacy. *Journal of Multidisciplinary Sciences (Mikailalsys)*, 4(2), 1527–1550. <https://doi.org/10.58758/mikailalsys.v4i2.10300>
- Pangemanan, A. E., & Perwita, A. A. B. (2022). Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia: Kerjasama Kemaritiman Indonesia – Australia Dalam ‘ Plan of Action for the Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation 2018-2022. *Jurnal Maritim Indonesia*, 10(1), 35–48. <https://doi.org/10.52307/jmi.v10i1.101>
- Pangemanan, A., Ibrahim, A., Suryanti, B. T., Hermansah, F., & Putra, P. R. B. (2021). Upaya Diplomasi Pertahanan ASEAN Di Laut Cina Selatan (ASEAN Defense Diplomacy Efforts in the South China Sea). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7(2). <https://doi.org/10.33172/jdp.v7i2.727>
- Po, S. (2023). Navigating the Storm: How ASEAN Managed the Great Power Competition Through the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. *Journal of Accounting Finance Economics and Social Sciences*, 8(2), 23–37. [https://doi.org/10.62458/jafess.160224.8\(2\)23-37](https://doi.org/10.62458/jafess.160224.8(2)23-37)
- Prabowo, A. R. (2022). Diplomasi Maritim Indonesia-Australia di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force. *Bappenas Working Papers*, 5(2), 176–195. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.169>
- Rachmawati, I. (2017). Indonesian Public Diplomacy: Preserving State Existence through Sharing of Indentities to Gain Mutual Understanding. *Jurnal Global & Strategis*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.20473/jgs.11.1.2017.55-71>
- Rahmadhani, P., Apriwan, A., & Setyaka, V. (2023). Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Perbatasan dengan Meksiko. *Politics, Humanities, Laws, International Relations And Social Journal*, 2(2), 39–53. <https://doi.org/10.25077/palito.2.2.39-53.2023>
- Rahmadhani, P., Perwita, A. A. B., & Ramsi, O. (2025). Building Regional Readiness Indonesia's Leadership in Enhancing AHA Centre's Disaster Response Capabilities. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(3), 907–928. <https://doi.org/10.58578/ijhess.v3i3.6951>
- Rai, M. S. (2022). Revisiting QUAD's ambition in the Indo-Pacific leveraging Space and Cyber Domain. <https://arxiv.org/abs/2209.04609>
- Sari, Y. R. Y. (2023). Indonesian Defence Diplomacy: France as A Partner in Military Defence Revitalization during 2019-2023. *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, 3(1), 139–150. <https://doi.org/10.22219/gli.v3i1.25585>
- Scott, D. (2019). Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 194–217. <https://doi.org/10.1177/1868103419860669>
- Setiawan, A. (2025). Indonesia's Joins BRICS: Balancing Economic Opportunities and Geopolitical Challenges in a Multipolar World. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(3), 2075–2082. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1567>
- Suherry, S., Husni, A., Rifa'i, A., Akbar, M. D., & Hamdan, T. (2025). Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Maritim di Laut Natuna Utara (Perspektif Teori Mandala). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 95–107. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.270>
- Susilowati, I., Maulida, S., & Hartadi, N. A. (2024). Indonesia ' s Strategy in Maritime Defense Diplomacy to the State FPDA Members (Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand,



- and United Kingdom). *'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 8(5), 23–54.
<https://doi.org/10.15408/adalah.v8i5.41088>
- Wirawan, A. (2023). Diplomasi Energi dan Ekonomi Politik Kedaulatan Maritim Indonesia. *Jurnal Global Strategis*, 17(2), 45–60.
- Zulkifli, A., Wibisono, M., Perwita, A. A. B., & Mahroza, J. (2023). Foreign Policy and Defense Diplomacy in ASEAN to Maintain Stability and Security in the Indo-Pacific Region. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 15(1), 263–272.
<https://doi.org/10.15575/jpan.v15i1.25091>